**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Secara umum, Ilmu Hubungan Internasional identik dengan security issues dan instrument militer. Selain masalah keamanan, topik mengenai politik juga sering kali muncul dalam studi Hubungan Internasional. Berbagai perang yang tercatat dalam sejarah dunia mengakibatkan Ilmu Hubungan Internasional berpusat pada isu-isu politik dan keamanan yang biasanya ditangani dengan instrument militer. Setelah disadari adanya pola tertentu pada alur sejarah yang berulang. Ilmu pengetahuan pun perlahan berkembang. Seiring dengan berkembangnya zaman ilmu pengetahuan pun berkembang pesat, begitu pula dengan Ilmu Hubungan Internasional. Hubungan Internasional mulanya hanya berpusat pada politk dan keamanan, kini berkembang dan mulai menyoroti pentingnya isu-isu lain selain keamanan. Perkembangan yang ada tidak hanya terjadi dalam kajian isu semata, namun juga pada keberadaan dan pentingnya aktor-aktor non negara sebagai aktor baru dalam kajian Hubungan Internasional pun berkembang lebih jauh karena adanya hubungan maupun interaksi antara aktor-aktor dan isu-isu baru tersebut.

*Pasca* Perang Dingin, dunia Internasional mulai sadar dan memperhatikan isu-isu lain. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan zaman membuat manusia sadar akan isu-isu lintas batas selain isu keamanan seperti,isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan ekonomi, dimana aktor yang berperan tidak tidak hanya sebatas negara.[[1]](#footnote-1)Segala bentuk interaksi lintas batas adalah bagian dari kajian Hubungan Internasional[[2]](#footnote-2).Dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional, isu-isu selain isu keamanan dan politik dikatagorikan sebagai isu *low politics* atau isu non trasional.[[3]](#footnote-3)

Masa setelah perang Dingin cukup signifikan dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional, karena sejak itulah dunia Internasional menjadi lebih memperhatikan isu *low politics*. Kajian *low politics* meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, *human security,* dan sosial budaya. Pentingnya isu *low politics* selama ini kurang diperhatikan dalam Ilmu Hubungan Internasional, hingga disadari bahwa terkadang isu *low politics* berpotensi menjadi salah satu sumber masalah yang mengakibatkan konflik terbuka.

Salah satu hal yang menjadi kajian isu *low politics* adalah globalisasi. Masa setelah Perang Dingin juga merupakan momen yang memicu maraknya globalisasi. Ada beberapa hal yang sering kali dikaitkan dengan globalisasi seperti, intergrasi ekonomi, kapitalisme, dan kemajuan teknologi, namun sebenarnya globalisasi tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut. Globalisasi sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu alasan yang mengangkat isu *low politics* seperti sosial dan budaya, hingga menjadi lebih diperhatikan saat ini.

Sebagai mahluk sosial, sangatlah wajar jika manusia saling membutuhkan satu sama lain. Ketika peradaban belum semaju saat ini, ketergantungan antar manusia hanya sebatas interaksi langsung. Dengan berkembangnya peradaban, kini manusia memiliki berbagai cara untuk berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai interaksi tersebut adalah kemajuan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan teknologi tentunya tidak dapat dipisahkan dengan maraknya arus globalisasi, terutama setelah perang dingin berakhir. Teknologi komunikasi dan informasi. Revolusi teknologi yang begitu cepat menimbulkan perubahan mendasar pada interaksi antar individu dalam tingkat yang paling rendah. Sebagai akibatnya, perubahan dalam level dasar tersebut mempengaruhi pula pola interaksi pada level yang lebih tinggi. Komunikasi yang ditunjang teknologi tinggi pada akhirnya yang menggerakkan manusia ke arah interkonektivitas global.

Media komunikasi tersebut kemudian memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi lebih cepat, serentak, aktual dan menyeluruh, dalam arti sanggup menjangkau khalayak yang tidak terbatas. Bentuk media tersebut kemudian lebih dikenal dengan sebutan media massa. Dengan kemampuannya yang dapat mempengaruhi cara pandang, kebiasaan, dan kesepakatan-kesepakatan sosial, fungsinya sebagai penyedia informasi kemudian bergeser menjadi penyedia substansi yang dapat menciptakan kenyataan yang baru ataupun kenyataanya sendiri.

Media massa merupakan basis bagi apa yang disebut sebagai industri kebudayaan, dimana media massa telah tumbuh menjadi industri yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi semakin tertarik dengan isu-isu yang amat erat kaitannya dengan globalisasi media massa, yaitu globalisasi budaya. Globalisasi budaya itulah yang kemudian menjadi bentuk yang paling familiar bagi kebanyakan orang. Sebuah budaya yang dikenal, dicintai, dan juga dilakukan oleh banyak orang. Inilah yang dinamakan sebagai budaya populer atau yang dikenal dengan istilah *pop culture*.

Budaya populer dapat disukai terkait dari elemen-elemen populer yang berasal dari manusia, seperti dikutip Peter Goodall bahwa elemen-elemen populer dalam budaya populer merupakan refleksi dari semangat aktualisasi diri, pembebasan hasrat berekspresi dan pemuasan instingtif manusia yang alami dan naluriah. Budaya populer sebagaimana yang diyakini Antonia Gramsci merupakan karakter ilmiah dari masyarakat karenanya budaya populer kerap dijadikan sarana pengaktualisasikan kegelisahan, kritik, kegembiraan dan segala macam gejolak yang terjadi. Budaya populer memang bukan suatu yang disakralkan seperti agama, namun ia sangat relistis, duniawi, yang konkret dan karena itulah budaya populer sangat cocok untuk dinamika massa.[[4]](#footnote-4)

Film dalam konteks budaya populer merupakan media penyajian citraan yang efektif. Di satu sisi film dapat menjelma menjadi sebuah tontonan yang menakutkan, menghibur, menyedihkan atau sebagainya, tetapi di satu sisi, melalui kekuatan dan kemampuannya film memilki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya.[[5]](#footnote-5)

Perkembangan perfilman didunia sangat pesat. Sekarang ini, banyak sekali orang membuat film. Bahkan mereka belomba-lomba membuat film hingga menghabiskan dana ratusan juta. Dengan menampilkan efek video yang diluar nalar manusia.[[6]](#footnote-6) Film adalah dokumen kehidupan sosial sebuah komunitas. Film mewakili realitas kelompok masyarakat pendukungnya itu. Baik realitas dalam bentuk imajinasi ataupun realitas dalam arti sebenarnya. Film menunjukkan pada kita jejak-jejak yang ditinggalkan pada masa lampau, cara menghadapi masa kini dan keinginan manusia terhadap masa yang akan datang. Sehingga dalam perkembangannya film bukan lagi sekedar usaha menampilkan “citra bergerak” (moving images), namun juga telah diikuti oleh muatan-muatan kepentingan tertentu seperti politik, kapitalisme, hak asasi manusia atau gaya hidup. Fenomena perkembangan film yang begitu cepat dan tak terprediksikan membuat film ini disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Bukan saja oleh negara-negara yang memiliki industri film besar, tapi juga oleh negara-negara yang baru akan menata industri filmnya.

Film juga sudah dianggap bisa mewakili citra/identitas komunitas tertentu. Bahkan bisa membentuk komunitas sendiri, karena sifatnya yang universal. Kebudayaan sebagai bukti peradapan manusia mengalami perkembangan dan perubahan. Penetrasi kebudayaan antar negara melalui berbagai macam cara, baik damai maupun kekerasan, determinasi ideologi, politik, maupun ekonomi menjadi suatu media perubahan kultural tersebut. Dengan cara damai, kebudayaan masuk dan mempengaruhi kebudayaan lain melalui media cetak maupun elektronik. Kalau kita coba melacak perkembangan budaya massa saat ini, kita akan dihadapkan pada sekian banyak istilah yang saling berkaitan: budaya populer, budaya dangkal, budaya konsumen, budaya komersil, industri budaya, dan seterusnya. Objeknya pun bisa berupa karya sastra, film, lagu dan lainnya.[[7]](#footnote-7) Salah satu media elektronik yang ampuh digunakan dalam penetrasi budaya adalah film.

Film pada dasarnya merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh seseorang melalui proses yang melibatkan kemampuan imajinasi serta daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya. Film yang beredar merupakan karya yang memiliki nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan kepada umum. Nilai-nilai yang ada pada film inilah yang mampu mensosialisasikan maupun menciptakan suatu nilai budaya di negeri ini. Pada dasarnya suatu nilai film bertujuan untuk pembinaan maupun pengembangan nilai sosial kultural, mencerdaskan bangsa, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan film inilah nilai-nilai positif diharap mampu diinternalisasi kepada masyarakat secara mudah.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan film Korea dn pengaruhnya terhadap perkembangan film Korea di Indonesia. Karena itu penulis mengambil penelitian ini tentang :

“**DIPLOMASI KEBUDAYAAN DAN APRESIASI KAUM MUDA TERHADAP FILM DAN DRAMA KOREA ”**

Harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dengan adanya Film dan Drama Korea di Indonesia maka dapat mempengaruhi Apresiasi Kaum Muda di Indonesia.

**B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang telah penulis kemukakan masalah tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa Korea melakukan diplomasi kebudayaan korea melalui film dan drama ke Indonesia?
2. Tantangan dan peluang apa saja yang di hadapi dalam mendiplomasikan kebudayaan melalui film dan drama?
3. Pengaruh yang ditimbulkan dari film dan drama Korea terhadap Apresiasi kaum muda di Indonesia ?

**1. Pembatasan Masalah**

Perkembangan isu ini memiliki permasalahan yang luas dan kompleks, Sehingga penulis mencoba untuk membatasi masalah yang akan diteliti pada perkembangan film Korea di Indonesia yang difokuskan pada pengaruhnya terhadap perkembangan perfilman di Indonesia.

**2. PerumusanMasalah**

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan penganalisaan mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti tersebut di atas sebagai berikut :

 **“SEJAUHMANA PEMERINTAH KOREA DALAM MENDIPLOMASIKAN KEBUDAYAANNYA MELALUI FILM DAN DRAMA KOREA DI INDONESIA”?**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pemerintah Korea dalam mengetahui mengdiplomasikan kebudayaan melalui film dan drama Korea.

2**.** Untuk mengetahui kemunculan pengaruh yang ditimbulkan dari kebudayaan Korea melalui film dan drama Korea.

3.Untuk mengetahui diplomasi korea dalam apresiasi kaum muda terhadap film dan drama korea

.

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1**.** Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai film Korea yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan film Indonesia.

2. Untuk memberikan sedikit sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mengamati dan mengetahui tentang para pegiat film Korea di Indonesia.

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memunculkan para pegiat-pegiat muda untuk bisa berkarya lewat film Korea yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan kata lain, hasil dari penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.

Sebagai salah satu syarat dalam menenmpuh ujian sarjana satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Pasundan Bandung.

**D. kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

**1. Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka penulis ini, penulis mencoba untuk mengemukakan batasan ilmiah berupa kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti, yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami fenomena Hubungan Internasional, khususnya tentang masalah perfilman dan drama sesuai dengan yang ada di judul penelitian.

 Dalam hal ini Hubungan Internasional tidak melulu mempelajari kegiatan interaksi antara bangsa atau negara saja. Studi hubungan internasional juga mencakup berbagai aspek dan isu dari interaksinya, seperti kebijakannya luar negeri maupun kerjasama antar negara. Unsur aktor non-negara juga memiliki kontribusi yang penting dalam Hubungan Internasional.

 Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles McClelland dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional : Teori Dan Sistem, sebagai berikut :

 **“Hubungan Internasional sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus, informasi, serta berbagai respon prilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termaksud komponen-komponen.”[[8]](#footnote-8)**

 Dari pengertian di atas Hubungan Internasional ruang lingkupnya mencakup segala bentuk interaksi yang banyak dilakukan oleh aktor non-pemerintah menyangkut persoalan-persoalan yang melintasi batas-batas negara. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan kebebasan dalam menuangkan buah pikirannya, seperti pemikiran mengenai kebebasan oleh John Looke yakni, bahwa kebebasan alami manusia ialah terbebas dari setiap kekuasaan duniawi (yang lebih tinggi), tidak tunduk pada kemaun atau kekuasaan seorang manusia (raja), melainkan sepenuhnya mengikuti aturan alami sebagai landasan hak-haknya. Kebebasan seorang manusia dalam sebuah masyarakat tidak berbasis pada kekuasaan (orang) lain yang dipaksakan berdasarkan keturunan, juga tidak pada kekuasaan dan keinginan atau keterbatasan sebuah undang-undang selain yang diputuskan dalam parlemen yang bisa dipercaya.[[9]](#footnote-9)

 Di samping itu menurut Rousseau, kebebasan itu terdiri dari tiga elemen yaitu kemauan/keinginan yang bebas *(free will),* kebebasan dari aturan hukum (Rousseau tidak percaya adanya hukum atau seakan-akan tidak ada hukum) dsn yang paling penting adalah kebebasan personal. Rousseau mengatakan bahwa manusia pertama hidup seperti hewan, dia mengatakan tidsk bermaksud menghina, hsnya dalam arti bahwa manusia-manusia ‘asli’ hanya mencari pemenuhan kebutuhan fisik sederhana dari mereka. Mereka tidak akan membutuhkan hak untuk berbicara, atau konsep, dan tentu saja bukan properti. Pertama kali manusia akan memiliki rasa mengenai properti (menurutnya) adalah ketika mereka menetap di satu lokasi, ketika mereka membangun pondok untuk tinggal. Rousseau juga menggangap bahwa satu-satunya alasan mengapa masyarakat berubah adalah mungkin akibat dari berbagai bencana, kekurangan makanan atau kesulitan yang lainnya. Mungkin hal ini mulai memaksa orang untuk mulai mengidentifikasikan daerah tertentu sebagai wilayah mereka, dan mungkin mulai hidup di dalam kelompok. Hal ini menimbulkan terjadinya peningkatan komunikasi dan pengembangan bahasa. Hal ini menimbulkan terjadinya peningkatan komunikasi dan pengembangan bahasa. Selain itu, ada juga dimensi kedua yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu manusia mulai menilai diri mereka sendiri berdasarkan sebuah kriteria yang baru yaitu bagaimana orang lain berpikir terhadap mereka.[[10]](#footnote-10)

 Tentu saja hal ini menunjukan gejala yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon, kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai kontruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikontruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respon-respons terhadap stimulus dalam dunia ognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

 Dalam penjelasan Deey Nu Hidayat, bahwa paradigma kontruktivis memandang realitas sebagai kontruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian, kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi, yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.[[11]](#footnote-11) Melihat berbagai karakteristik dan substansi pemikiran dari teori kontruksi sosial nampak jelas, bahwa teori ini berparadigma konstruktivis.

 Dalam suatu konstruksi sosial tersebut terjadi penyampaian sebuah pesan, komunikasi jelas sangat diperlukan terutama komunikasi yang melewati batas-batas wilayah. Dalam hal ini peran Komunikasi Internasional (KI) sangat dibutuhkan, sehingga penulis disini akan coba menjelaskan definisi KI.

 Menurut Teuku May Rudy mendefinisikan KI yakni Komunikasi yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara dan menyangkut interaksi/hubungan cukup luas dan intens dengan bangsa lain.[[12]](#footnote-12) Konsep ini menjelaskan bahwa komunikasi internasional yang bermuara pada diplomasi internasional melalui media massa yang secara teoritis lebih dekat pada komunikasi massa.

politik luar negeri) antar lain, kesenian, pariwisata, olah raga, tradisonal, teknologi sampai dengan pertukaran ahli dan lain sebagainya.

Menurut Tulus dan wahyu kartika sari (2007) menjelaskan Diplomasi Kebudayaan sebagai sebuah upaya suatu negara untuk memperjuangkan melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga dan kesenian, ataupun secara makro misalnya propaganda. Tujuan dari Diplomasi ini adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakatnegara lain) guna mendukung suatu kebijakan politik luar negeri tertentu. Para pelaku kegiatan Diplomasi kebudayaan adalah pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, individual maupun kolektif, atau setiap warga negara. Adapaun materi yang dipakai dalam diplomasi kebudayaan adalah segala hal yang dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam politik luar negeri) antara lain, kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi sampai dengan pertukaran ahli dan lain sebagainya.

Dalam hubungan diplomatik tingkat konsuler tersebut telah dibuka banyak kesempetan bagi kedua negara untuk bekerjasama diberbagai bidang demi kepentingan kedua negara (Yang Seung Yoon, 2010). Kebudayaan adalah salah satu bidang yang menjadi fokus kerjasama RI-ROK karena dinilai dapat memperkuat hubungan persahabatan kedua negara melalui konsep *people to people.* Komitmen kerjasama ini kemudian dibuktikan dengan membuat perjanjian kebudayaan melalui Agreement between the government of the Republic of Indobesia and the government of the Republic of Korea Cultural Cooperation yang ditandatangani pada 28 November 2000 (kemenli.go.id). sebagai tindaklanjut dari kerjamasama kebudayaan ini, pada 14-15 Mei 2008 di Jogjakarta diadakan The first Cultural committee meeting RI-ROK yang menyepakati film sebagai bagian dari bentuk pertukaran kebudayaan antar kedua negara disamping seni tradional, kerajinan, musik dan pariwisata (Laporan Kegiatan Sidang Pertama Komisi Bersama Kebudayaan RI-ROK).

Film dan drama korea sering kali disebut sebagai agen pertama penyebab terjadinya gelombang korea/*korean Wave*. Hal ini sebagaimana ditulis Doo Boo Shim (2006) dalam artikel nya yang berjudul Hybridity and the rise Korean popular culture in Asia, bahwa drama Korea pertama yang berjudul What Is Love About pada tahun 1997 yang mulai ditayangkan di China melalui sebuah media China Central Television Station (CCTV) mendapatkan rating tertinggi kedua dalam sejarah pertelevisian China serta mendapatkan banyak permintaan untuk kembali di tayangkan oleh *CCTV* Pada tahun 1998.

 Pada tahun 1999, drama televisi korea lainnya, Sejak saat itu, drama televisi Korea secara cepat memenuhi program televisi di beberapa negara Hongkong, Taiwan Singapore, Vietnam dan Indonesia sehingga seorang jurnalis China menamai fenomena ini sebagai *Hallyu,* atau dalam bahasa mandarin disebut *Hanliu* yang berarti Gelombang *Korea* atau *Korean Wave.*

Di Indonesia, program drama Korea masuk melalui stasiun TV Indosiar yang menanyangkan drama Winter Sonata dan drama Endless Love pada tahun 2002. Selanjutnya, Trans TV menayangkan Drama Glass Shoes and Lover, dan di tahun 2003 *TV 7(sekarang Trans7)* menayangkan *Beautiful Days.* Selama kurun waktu 2002-2003 SCTV pernah pula menayangkan beberapa drama Republic of Korea diantaranya *Invitation*, Pop Corn, Four Sisters, Successfyl Blitzmegaplex, sehingga film dan drama korea tidak hanya dapat diakses melalui DVD, tetapi juga dapat dilihat di bioskop (Mukhtasyar Syamsudin, 2012).

Sebagaimana produk film Hollywood, film dan drama Korea di Indonesia memiliki banyak penggemar. Menurut keterangan dari Laporan The Cultural Cooperation and Korean Wave (Hallyu), terdapat 55, 9675% akun facebook drama Korea Indonesia dari keseluruhan fanbase akun facebook komunitas pecinta Korea Indonesia. Salah satu akun facebook dengan nama “Korean Drama Indonesia”.Salah satu akun twitter bernama @allkoreandrama memiliki follower 25.446. Survei ini menjadi bukti bahwa film Korea dapat diterima masyarakat Indonesia (Ratih Pratiwi Anwar,2012).

Menurut Wahyudi Wibowo (2012), popularitas gelombang Korea/Korean Wave terjadi karena adanya kolaborasi antara pemerintah dan individu. Pemerintah Korea dalam hal ini secara konsisten sejak masa pemerintah Klim Dae Jung melakukan pengembangan kebijakan budaya (Culture Policy) dengan mengeluarkan kebijakan The Basic Law of Cultural Industry Promotion dengan mengalokasikan total anggaran sebesar 148,5 juta dollar untuk pengembangan industi budaya (Shim : 2006) dan 125 juta dollar untuk mempromosikan film korean dalam rentang waktu antara 1999-2003 (Dal Yong Jin:2006). Kim Dae Jung juga memberikan slogan *“Provide Support, but do not interfere”* [[13]](#footnote-13)terhadap kebijakannya dalam industri film (Kim Mee Hyun:2007). Sedangkan pada masa Lee Myung Bak, aspek korean Wave digunakan sebagai alat diplomasi kebudayaan yang juga menjadi bagian dari visi kementerian budaya, olah raga dan pariwisata Korea.

Paradigma Hubungan Internasional menurut K.J. Holsti dalam bukunya International Politics, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional sebagai:

**“Semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak ia mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme, perdagangan interasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai dan etika politik internasional”**

Hubungan Internasional adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antar pemerintah, organisasi-organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena Hubungan Internasional berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. Selain ilmu politik, Hubungan Internasional menggunakan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia,dan hak-hak asasi manusia.

 Hubungan international merupakan satu gambaran persatuan yang kuat yang mengikat seluruh negara didalam satu wadah. Relasi ini mempunyai ikatan kuat bagi setiap individual pemimpin dari berbagai manca Negara, beberapa bentuk ikatan ini sebagai berikut:

Politik International Hubungan ini terarah dalam perpolitikan dimana politik satu negara tidak mungkin sama dengan yang lain. Dari sisi inilah lahir hubungan diplomatik yang bertujuan untuk kemajuan dan menjalin hubungan yang akur. Tapi sayangnya para pejabat diploma yang ditugaskan dalam hal ini kebanyakan melenceng dari tugas mereka, bahkan pemilihan para diploma untuk luar negeri terpilih dengan cara sistem kekeluargaan atau jasa.

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :

* Organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.
* Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional (Phartiana,2003 : 4).[[14]](#footnote-14)

 Seiring dengan dilakukannya diplomasi kebudayaan Korea pada tahun 2009, di Indonesia juga mulai diselenggarakan event festival Korea di jakarta. Kemudian ditahun 2013 event serupa kembali diselenggarakan di dua kota besar, Jakarta dan Bandung. Bersamaan dengan hal ini juga dilakukan agenda kampanye pariwisata Korea melalui *Visit Korea 2010-2012*, yang menjadikan lokasi-lokasi syuting.

Perkembangan diplomasi di era globalisasi menjadikan diplomasi itu sendiri semakin beragam. Salah satunya yaitu diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan merupakan salah satu alat bagi negara negara pada saat ini untuk mendapatkan posisi di mata internasional. Untuk itu, penting menganalisis peran kebudayaan sebagai salah satu kekuatan diplomasi. Karena bentuk dan kekuatan diplomasi kebudayaan suatu negara beragam.

Konsep diplomasi kebudayaan berasal dari dua kata yakni diplomasi dan kebudayaan. Diplomasi merupakan instrumen yang digunakan dalam hubungan internasional untuk mencapai kepentingan nasional. Secara konvensional, diplomasi adalah usaha suatu bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini diplomasi diartikan bukan hanya perundingan, tapi semua upaya hubungan luar negeri. Menurut Harold Nicholson, diplomasi adalah hal-hal yang mencakup politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi, dan suatu cabang dinas luar negeri.

Sementara definisi kebudayaan, menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi adalah :

**“Semua hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Karya menghasilkan  teknologi kebendaan atau (*material culture*) yang diperlukan manusia untuk enguasai sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk kehidupan masyarakat.”**

Sehingga jika definisi ini disatukan, maka dapat diperoleh gambaran bahwa diplomasi kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam percaturan masyarakat internasional. Diplomasi kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Selain itu definisi lain mengenai diplomasi kebudayaan adalah suatu teknik pemanfaatan dimensi kekayaan dalam percaturan hubungan antar  bangsa.”

Kegiatan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara, tetapi juga non-negara, misalnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok, dan individu. Intinya, kegiatan diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam kegiatan diplomasi yang dimaksud disini adalah kegiatan diplomasi kebudayaan dalam artian makro, yaitu yang termanifestasikan dalam pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan ilmu pengetahuan.

Diplomasi kebudayaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan di bidang budaya yang diintegrasikan ke dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara dan pelaksanaannya dikoordinasikan sepenuhnya oleh Departemen Luar Negeri (Deplu). Diplomasi kebudayaan juga harus didukung dengan kekuatan dan kewi-bawaan ekonomi, politik, dan militer. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan pada umumnya efektif dijalankan oleh negara-negara maju. Akan tetapi pada dasarnya ada dua hal penting dalam diplomasi kebudayaan.

Pertama, bahwa diplomasi kebudayaan hanya menyangkut pe-manfaatan kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Dalam garis itu diplomasi kebudayaan harus dibe-dakan dari pemanfaatan kebudayaan di luar kerangka politik luar negeri, misalnya untuk kepentingan pariwisata. Kedua, pada saat ia mengatakan bahwa diplomasi kebudayaan harus melibatkan kekuatan dan kewibawaan politik, ekonomi, dan militer, dan semua itu dimiliki oleh negara maju, maka efektivi-tas diplomasi kebudayaan dipengaruhi oleh ketidaksetaraan hubungan di antara negara-negara yang terlibat dalam diplomasi kebudayaan itu. Dengan kata lain, diplomasi kebudayaan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan jika berlangsung dalam pola hubungan dominatif-subordinatif, dan insiatif untuk menjalankan diplomasi itu diambil oleh negara maju (dominan) dalam hubungannya dengan negara berkembang (subordinat), dan bukan sebaliknya.

Kedua istilah diplomasi kebudayaan digunakan untuk menyebut pemanfaatan kebudayaan baik dalam rangka praktik politik luar negeri maupun untuk kepentingan pariwisata atau dengan cara lain dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan bagian dari diplomasi kebudayaan. Dengan pemahaman itu pula kedua penulis tersebut menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan ternyata dapat diterapkan secara baik dan berhasil oleh negara negara berkembang seperti Indonesia dengan cara menjalin kerja sama dengan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS).

Diplomasi Kebudayaan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan bangsa dalam memahami, menginformasikan dan mempengaruhi (membangun citra) bangsa lain lewat kebudayaan. Sebenarnya tindakan yang paling efektif untuk merubah citra adalah dengan merubah realitas, namun diplomasi kebudayaan juga menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mencapai kepentingan bangsa, agar bangsa lain dapat memahami, mendapat informasi dan dapat dipengaruhi untuk kepentingan-kepentingan berbagai hal dari bangsa kita. Dengan dilakukannya diplomasi kebudayaan, dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman untuk peningkatan citra positif, membangun saling pengertian dan memperbaiki citra bangsa.

Diplomasi kebudayaan tidak hanya berurusan dengan perkara politik, khususnya politik luar negeri, tetapi juga berkaitan dengan bidang lain seperti pariwisata dan perdagangan ekspor. Oleh karena itu, ukuran-ukuran untuk menilai keberhasilan diplomasi ini juga menca-kup lebih banyak variabel. Misalnya indonesia sebagai negara berkembang, dengan Perkembangan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia dan angka ekspor produk non-migas dari Indonesia ke Luar Negeri hanyalah dua contoh dari sejumlah kriteria yang diperlukan untuk menilai efektivitas diplomasi kebudayaan.[[15]](#footnote-15)

Dalam segmen liputan khusus situs Kontan.co.id, Dwihapsari Minto Raharjo, Marketing Maneger Korea Tourism Organization Jakarta, mengatakan jumlah wisatawan Indonesia pada bulan September 2012 mencapai 108. 433 orang, mengalami peningkatan 25.8% dibanding tahun 2011. Ia juga menuturkan bahwa salah satu faktor pendongkrak wisatawan Indonesia ke Korea adalah karena popularitas *Hallyu/Korean Wave* melalui *K-Pop* dan *K-Drama. D*i jakarta sendiri terdapat dua meskapai penerbangan Internasional yang terbang secara langsung dari Indonesia (Jakarta) Ke Incheon (Seoul), yaitu Garuda dan Korean Air. Lokasi wisata yang paling diminati wisatawan Indonesia adalah Seoul dan Pulsu Jeju. Pulau Jeju merupakan pulau terbesar di Korea yang sering dijadikan tempat wisata lokasi syuting drama Korea, salah satu drama korea terkenal yang pernah melakukan syuting di pulau ini adalah *Boys Over Flower*

Sukses drama Korea menurut Bhadrawaj Ramesh mampu mendatangkan pendapatan tambahan (Additional Income) bagi Korea yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan di bidang pariwisata dan ekspor budaya Korea.Drama Winter Sonata misalnya, menurut Eun Mee Kim dan Jiwon Ryoo (2007) drama ini telah menghasilkan keuntungan sebesar 6.24 juta dolllar AS atau menyumbang 0,1% atas GD Korea di tahun 2004. Demekian pula, drama ini telah membuat orang tertarik untuk mengunjungi lokasi syuting di kawasan Pulau Nami (Nami Island).

Selain itu, kepopuleran drama korea juga telah meningkatkan ekspor budaya Korea dalam waktu 3 tahun (2002-2005) dsn secara tidak langsung juga meningkatkan Total Pendapatan/Total Revenue sektor budaya Korea.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan Unsu-Unsur kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, berupa berbagai festival musik angklung . Korea menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada Agustus 1966, dan Konsulat Indonesia di Seoul dibuka pada juni tahun 1968. Kemudian, kedua konsulat itu di tingkatkan statusnya menjadi kedutaan dengan pertukaran duta persahabatan melalui kunjungan pejabat tinggi dari negara masing-masing (Laporan Pelayanan Informasi Korea di Luar Negeri, 1994). Mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan *power* dan kontrol tersebut dapat dicapai melalui teknik-teknik pemaksaan dan teknik kooperatif. (Theodore A Clombus dan James H.Whole, 1990) Syarat minimum suatu negara adalah kemampuan untuk melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara lain. Jika diterjemahkan kedalam tujuan yang lebih spesifik maka pembela dan atau pelindung identitas fisik sama dengan memelihara integritas wilayah suatu negara. Melindungi identitas politik sama dengan melindungi eksistensi rejim-politik ekonomi seperti demokrasi yang kompotitif, komunis, sosialis, otoriter, dsn totaliter. Melindungi identitas kultural sama dengan etnis, agama, bahasa, dan norma sejarah negara (Theodore. 1990).

Komitmen Korea di Indonesia dalam bidang kebudayaan merupakan dalam Hukum Internasional bidang kebudayaan yang diterapkan oleh Korea disebutkan bahwa pemerintah ROK telah membangun kerjasama budaya dan membentuk komite umum kebudayaan demi memperkuat hubungan bileteral dan kerjasama budaya dibidang kebudayaan demi memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama kebudayaan dalam level Internasional. Pernyataan ini menunjukan bahwa ROK telah melakukan kontrak kerjasama kebudayaan dengan banyak negara. Perjanjian tersebut telah menandai dilakukannya aktivitas kerjasama kebudayaan dengan 80 negara. Selanjutnya, sebagai bentuk aktivasi pertukaran kebudayaan antar negara, pemerintah Korea mendirikan komite bersama kebudayaan di 30 negara dengan tujuan untuk memperluas pemahaman budaya antar bangsa.

Hakikat Budaya adalah “Budaya” berasal dari kata majemuk budi daya atau kekuatan dari akal, akal atau budi itu mempunyai unsur-unsur cipta atau pikiran, rasa, karsa atau kehendak. Hasil dari ketiga unsur itulah yang disebut kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa dan “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sansekerta) *budhayah* yang diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.

Adapaun istilah *culture* yang merupakan yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artimya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin Colere. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colore kemudian colore, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengeloh dan mengubah alam (Soekanto, 2006:150).

Orang yang pertama kali merumuskan definisi kebudayaan menurut Effendhie (1999: 2) adalah E.B Taylor (1832-1917), guru besar Antropologi di Universitas Oxford pada tahun 1883. Pada tahun 1871, E.B Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut:

**“Kebudayaan adalah mencakup ilmu pengetahuan, kepercayaan seni, moral, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”.**

Sementara itu, beberapa ilmuwan Indonesia juga telah membuat definisi kebudayaan. Koentjaraningrat, guru besaqr Antropologi di Univesitas Indonesia mendefinisikan kebudayaan sebagai “Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar”.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar.Unsur-unsur Budaya menurut Seokanto dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Suatu Pengantar” (2006: 153) mengemukakan bahwa kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu yang bersifat sebagai kesatuan.

Pada diri manusia terdapat unsur-unsur potensi budaya (Suparto, 1985: 54) seperti:

1. Pikiran (Cipta), yaitu kemampuan akal pikiran yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Dengan akal pikirannya manusia selalu mencari, mencoba menyelidiki, dan kemudian manemukan sesuatu yang baru.
2. Rasa dengan pancainderanya manusia dapat mengembangkan rasa estetika (rasa indah), dan ini menimbulkan karya-karya seni atau kesenian.
3. Kehendak (karsa), manusia selalu menghendaki akan kesempurnaan hidup, kemulian, dan kesusilaan.

Dengan potensi akal pikir (cipta), rasa, dan karsa itulah manusia berbudaya. Di samping ketiga unsur tersebut, Melville J.Herskovits juga mengemukakan unsur-unsur kebudayaan yang lain, yaitu:

1. Alat-alat teknologi
2. Sistem ekonomi
3. Keluarga
4. Kekuasaan politik

 Dalam laporan tahunan KBRI di Seoul (2001) disebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 30 negara patner Korea dalam menjalin kerjasama di bidang kebudayaan. Kerjasama ini telah dilakukan melalui persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2000 pada saat kunjungan kenegaraan presiden Kim-Dae Jung ke Indonesia. Secara efektif kerjasama ini dapat mendorong kuat bagi kedua negara unutk mewujudkannya dalam bentuk nyata. Hal ini terbukti ketika Indonesia mengadakan pameran pengenalan barang-barang kerajinan, tarian, kesenian, dan pariwisata Indonesia di Seoul yang berlangsung dengan baik. Begitupula sebaliknya.

 Lebih jauh lagi dalam laporan itu dijelaskan bahwasannya hubungan diplomatik antar Indonesia-Korea telah berjalan baik dan tidak terdapat masalah-masalah yang dapat menggangu hbungan kedua negara karena menganut prinsip-prinsip saling menghormati dan menginginkan peningkatan hubungan yang saling mengutungkan di berbagai bidang. Sementara itu, dalam bidang kebudayaan dengan bersedia tampil iklan media untuk mempromosikan negaranya. Selain untuk meningkatkan reputasinya di mata masyarakat Internasional.

 Sebagaimana telah disinggung diawal, inti dari perjanjian kebudayaan antara RI-ROK. Hal ini tercantum dalam darft Agreement betweeen the government of the Indonesian and the government of Korea on Cultural Cooperation yang menyatakan bahwasanya kedua negara memperkuat hubungan persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Korea yang mana dapat memberikan keuntungan timbal balik bagi rakyat kedua negara (Dokumen Kerjasama Perjanjian RI-ROK, 2007)

**2. Asumsi Penelitian**

2.1 Bahwa betul penerapan program perfilman dan drama korea di Indonesia dapat berpengaruh terhadap Apresiasi Kaum muda.

2.2 Memberi dampak positif terhadap kaum muda di Indonesia.

2.3 Diplomasi kebudayaan Korea melalui film dan drama dapat mempengaruhi apresiasi kaum muda di Indonesia.

**3. Hipotesis**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas oleh beberapa asumsi dari kerangka pemikiran di atas maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Diplomasi kebudayaan Korea melalui Drama Film dan sebagai alat/sarana untuk mendiplomasikan telah menarik kaum muda di Indonesia”**

1. **Tabel Operasional Variabel dan Indikator**

Untuk pengoperasian variabel, agar dapat melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis, haruslah ditetapakan indikator-indikator dari variabel penelitian, dengan menggunakan tolak ukur yang berdasarkan konsep teorik, konsep empirik dan konsep analisi tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Tebel Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalamHipotesis (Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas :Jika diplomasi kebudayaan Korea di Indonesia dalam Film dan Drama Korea berhasil maka mempengaruhi Variabel Terikat :Apresiasi kaum muda di Indonesia  | 1. Diplomasi kebudayaan Korea
2. Peningkatan diplomasi kebudayaan korea terhadap animo masyarakat di Indonesia
3. Kontruksi kebudayaan korea melalui film dan drama
4. Pengaruh kebuyaan korea terhadap Apresiasi kaum muda di Indonesia
 | 1. Data mengenai pemerintah Korea dalam mendiplomasikan kebudayaan Korea
2. Data (fakta & angka) mengenai Apresiasi kaum muda di Indonesia
3. Data (fakta & angka) mengenai kontribusi kebudayaan Korea melalui film dan drama
4. Data (fakta & drama) mengenai pengaruh kebudayaan korea terhadap Apresiasi kaum muda di Indonesia
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Tabel 1.2**

Skema kerangka teoritis Diplomasi Kebudayaan Korea di Indonesia dan pegaruhnya terhadap Apresiasi kaum muda di Indonesia atas film dan drama Korea

DIPLOMASI

KEBUDAYAAN KOREA

FILM DAN DRAMA

APRESIASI KAUM MUDA DI INDONESIA

**E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Tingkat Analisis**

Tingkat analisis digunakan agar memudahkan penulis memilah-milih yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan keselahan metologis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinkat analisa induksionis.

Analisa Induksionis merupakan sebuah unit analisa dimana unit eksplanasinya berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari pada unit analisanya. Dimana disini penulis akan menenpatkan variabel bebas yaitu apresiasi terhadap perfilman Korea di Indonesia sebagi unit analisa yang lebih tinggi dan menempatkan variabel terkait yaitu pengaruhnya terhadap perkembangan perfilman Korea di Indonesia sebagai unit ekspalanasi dari variabel unit.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bagong Suyanto dan Sutinah (2006) mengutip dari Taylor dan Bogdan (1984) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati orang-orang yang diteliti. Sementara menurut Strauss dan Colbin (2003), metode kualitatif berupa menemukan kenyataan empiris dari realistis sosial sehingga tercapainya pemahaman mendalam tentang realistis sosial tersebut.

**2. Metode Penelitian**

Penulis melihat metode ini akan membantu penulis dalam menjelaskan kepentingan Korea terkait Diplomasi Kebudayaan nya di Indonesia melalui keberadaan film dan drama Korea. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui survey dan studi pustaka atau studi dokumen baik dari sumber primer maupun sekunder. Data-data sekunder yakni seluruh data yang didapat dari berita media masa seperti koran, majalah, media online, artikel dan data dari sumber kepustakaan seperti buku-buku terkait, judul. Selain data sekunder, penulis juga akan menggunakan data primer berbentuk dokumen, data wawancara secara langsung dan data survey yang dilakukan melalui penyebaran quisioner secara online terhadap sejumlah informan di Indonesia dalam rangka memperoleh keterangan mengenai pemahaman dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap negara Korea.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini. Adapaun dalam proses ini teknik pengumpulan data melalui sebuah studi keperpustakaan yaitu berusaha membaca untuk mencari data melalui pengamatan tidak langsung dengan menmbaca buku tertentu, laporan, wabsite dan artikel, untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

**F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

a. Perpustakaan Universitas pasundan

Kampus 1

Jl. Lengkong Besar No.68

Telp: 022-4205945, 4262226

b. perpustakaan Kebudayaan

jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini akan di bagi menjadi 5 bab, yaitu

**BAB 1**

 Dalam bab ini, penulis akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik pengumpulan data, dsn sistematika pembahasan dari topik yang akan diteliti.

**BAB 2**

Pada bab ini, penulis akan di membahas mengenai perfilman, dimulai dari pengertian perfilman, sejarah kehadiran film Korea hingga munculnya film Korea di Indonesia.

**BAB 3**

Pada bab ini, penulis akan membahas lebih terperinci pada fenomena globalisasi media film di dunia, terutama di Indonesia. Selain itu akan di bahas apa saja yang berpengaruh pada perkembangan film Korea di Indonesia. Selain itu akan dibahas apa saja yang berpengaruh pada perkembangan film Korea di Indonesia dan banyak kemunculan komunitas pecinta film Korea di Indonesia.

**BAB 4**

Pada bab 4, penulis akan mempfokuskan pada bagaimana globalisasi budaya mempengaruhi perkembangan film Korea di Indonesia. Bab ini akan menekankan bagaimana perfilm Korea bisa terglobalisasi di Indonesia.

**BAB 5**

Dalam bab terakhir, penulis akan memberi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan yang berisi hasil dari penelitian dan juga merpakan sebuah penutup dan hasil akhir dari penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini, penulis membuat daftar yang berisi buku, makalah, artikel, berita maupun bahan lainnya yang dikutip dalam proposal ini.

1. Humas unpar. *Isu Keamanan Non-Tradisional dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. *Rabu 7 Maret 2012 dalam http://www.unpar.ac.id/berita.php?cmd=view&id=06011815271951&phpwebmailsessid=8007f069f761ad883d0f46cb7e02b868*  [↑](#footnote-ref-1)
2. Andre H. Pareira. *Perubahan Global dan Pekembangan Studi Ilmu Hubungan Innternasional*. Bandung: PACIS. 1999, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-2)
3. Anak Agung Banyu Perwita dan Yayasan Mochammad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.2005. hlm. 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Peter Goodall, *High Culture Populer Culture, The Long Debate.* Allen&Unwin Pty Ltd. 1995, hlm. 68 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003, hlm. 127 [↑](#footnote-ref-5)
6. Arifin Zainal Mustaqim dan Febi Lukmana, Pembuatan Film korea, Senin 9 Januari 2012 dalam *http://repository.amikom.ac.id/files/Publikasi\_08.02.7252.pdf* [↑](#footnote-ref-6)
7. Budiman, hikmat. *Lubang Hitam Kebudayaan.* Jakarta: Kanisius. 2002. Hal 32 [↑](#footnote-ref-7)
8. McClelland, Charles A. *Ilmu Hubungan Internasional* : *Teori Dan Sistem*. Jakarta: cv.Rajawali. 1981, hlm.25 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dikutip dari *http://library .fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07525.pdf* pada 13 April 2012 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dikutip dari *http//www.scribd.com/ray\_jordi/d77771778*-Asli-JJ-R pada 13 April 2012 [↑](#footnote-ref-10)
11. Deddy Nu Hidayat, *Paradigma dan Pengembangan Penelitian Komunikasi* dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol III. (Jakarta: IKSI dan ROSDA, 1999), hlm. 39 [↑](#footnote-ref-11)
12. T. May Rudy. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional.* Refika Aditama, Bandung. 2005, hlm. 125 [↑](#footnote-ref-12)
13. Support yang diberikan pemerintah Kim Dae Jung meliputi dukungan dana, dukungan investasi produksi dan distribusi [↑](#footnote-ref-13)
14. http://doif-green.blogspot.com/2010/04/paradigma-hubungan-internasional\_26.html [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://farahdibarizal.blogspot.com/2012/12/diplomasi-kebudayaan.html> [↑](#footnote-ref-15)